

MODERATISME PENDIDIKAN PESANTREN DI INDONESIA

(Kajian Modalitas Pesantren Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)¹

Dwi Kusmira

ABSTRAKSI

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai sebuah integrasi ekonomi ASEAN akan memberikan dampak kepada berbagai sektor kehidupan termasuk sistem pendidikan di Indonesia tidak terkecuali pendidikan pesantren. Persoalan yang muncul adalah bagaimana pesantren yang dikenal sebagai pendidikan *indigenous* mampu beradaptasi dengan persaingan global dalam MEA dan bagaimana pesantren merancang kembali konsep pendidikannya yang moderat sehingga dapat memperkuat daya saing pesantren tanpa harus kehilangan identitas pesantren sebagai pendidikan *indigenous* Indonesia?

Hasil kajian menunjukkan bahwa pesantren berdasarkan beberapa nilai-nilai moderat yang ada di dalam dunia pesantren telah memiliki kesiapan untuk memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN. Beberapa nilai-nilai moderat untuk menghadapi MEA adalah nilai-nilai multikultural sebagai konsep adaptatif terhadap perkembangan zaman, tradisi akademik yang non dikotomik, manajerial modern yang berbasis mutu dan kepemimpinan kolektif kolegial serta pesantren sebagai poros ekonomi umat.

Key Words : multikulturalisme pesantren, kepemimpinan kolektif kolegial, tradisi akademik, poros ekonomi pesantren

A. PENDAHULUAN

Cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid menyebutkan bahwa pesantren mengandung makna keislaman sekaligus keaslian (*indigenous*) Indonesia. Sebagai sebuah pendidikan *indigenous* di Indonesia pesantren terus melakukan adaptasi dengan perkembangan zaman yang terkenal dengan prinsip “memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil penemuan baru yang lebih baik”. Prinsip ini yang mendidik pesantren untuk tidak pernah berhenti dalam membenahi manajemen pesantren baik manajemen organisasi maupun manajemen pembelajaran. Pesantren pada awal berdirinya abad ke-15 dan menjamur pada abad ke-17 di tanah Jawa berbasis pada figur kyai dalam bentuk sorogan dan bandongan sebagai metode pembelajarannya, belum dijumpai sistem klasikal. Dalam perkembangannya, ketika Hindia Belanda memperkenalkan model klasikal dalam pendidikan di Nusantara, pesantren merespon model pembelajaran klasikal tersebut dan diterapkan dalam pendidikan pesantren.²

¹ Penulis, Dwi Kusmira, S.Sos.I, Guru MA dan Staf BK PPMI Assalaam.

² Kadarusman, *Moderasi Turats Pesantren Menapaki Jejak-Jejak Kehidupan 24 Jam*, (Solo : Assalaam Press, 2005), p. 7

Dalam konteks Indonesia modern, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) sebagai perpanjangan dari berbagai pertemuan rutin para pemimpin Negara ASEAN, dalam menjaga dan penguatan *ASEAN Community* menjadi kesepakatan yang tidak bisa ditolak. Konsep dasar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 dalam perspektif sektor kerjasama terdiri dari tiga (3) poin utama, yaitu: politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pendidikan secara luas telah dikembangkan menjadi sektor perekonomian yang bergerak dalam bidang jasa. Oleh karena itu, tidak mungkin dalam aplikasinya, peran serta Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan lepas dari kerjasama pendidikan dengan berbagai atribut di dalamnya (kurikulum, sistem pendidikan, perundang-undangan).³

Pendidikan Islam (termasuk di dalamnya pesantren) oleh Malik Fadjar (1993) disebutkan merupakan jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan (Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan sebagaimana ilmu yang lain). Pendidikan Islam juga merupakan bagian dari sumber nilai-nilai agama yang harus diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini pendidikan Islam banyak menghadapi tantangan mulai dari proses pelaksanaan pendidikan hingga bagaimana menciptakan *output* yang sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya.

Di Indonesia, pendidikan Agama (termasuk pesantren) adalah bagian integral

dari pendidikan nasional sebagai satu kesatuan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB II pasal 3 tentang Dasar, fungsi dan tujuan, yang menjelaskan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁴

Dari tujuan pendidikan nasional tersebut dapat dipahami bahwa salah satu ciri manusia Indonesia adalah beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Tujuan ini hanya dapat dicapai melalui Pendidikan (khususnya Islam) yang intensif dan efektif. Dalam hal ini, Pesantren sebagai salah satu manifestasi dari Pendidikan Islam harus memiliki visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta rencana dan aplikasi, yang mampu menciptakan insan-insan yang *ulul albab*. Dalam pandangan sistem manajemen, keberadaan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta rencana dan aplikasi menempati posisi penting sebagai tolok ukur dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang siap, baik secara Tauhid maupun secara *Science*.

Lahirnya komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) sebagai bagian dari dinamika kebangsaan tidak mungkin

³ Usman Abu Bakar, “Pesantren (Dari Dulu) Siap Untuk ASEAN Economic Community (AEC) 2016 (Studi Adaptasi Nilai Pesantren Menjadi Asrama Mahasiswa)”, *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Vol. 3 No 1 Januari 2017, p. 301

⁴ Kemendikbud, *Kumpulan Permen dan Permendikbud tentang Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas*, (Jakarta : Kemendikbud, 2014), p. 4

dilepaskan dari eksistensi pesantren. Pesantren mendapat tantangan untuk kembali melakukan rancang bangun desain pesantren sehingga dapat beradaptasi dengan persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Persoalannya adalah bagaimana pesantren yang dikenal sebagai pendidikan tradisional mampu beradaptasi dengan persaingan global dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tulisan ini mencoba untuk merumuskan bagaimana cara pandang pesantren yang moderat memaknai Masyarakat Ekonomi ASEAN ?. Bagaimana pesantren merancang kembali konsep pendidikan pesantren yang dapat memperkuat daya saing pesantren dalam persaingan global tanpa harus kehilangan identitas pesantren sebagai pendidikan *indigenous* Indonesia.

B. PESANTREN DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Pendidikan pesantren pada hakekatnya memiliki akar sejarah yang panjang bahkan sudah ada sebelum Indonesia merdeka di tahun 1945. Namun, sejarah pesantren menunjukkan dinamika yang tidak mudah menerima perubahan dari luar. Kemunculan pesantren awal yang berpusat kepada figure kyai menjadi hambatan tersendiri bagi pesantren untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di luar pesantren. Bahkan figure kyai pesantren tidak hanya mempengaruhi manajerial pesantren bahkan menjadi warna bagi keilmuan yang berkembang di pesantren. Kalau kyai ahli di bidang fikih maka pesantrennya akan lebih menitikberatkan kepada fikih. Begitu pula kalau kyai pesantren ahli di bidang tasawwuf maka pesantrennya juga akan menitikberatkan

kepada tasawwuf.⁵

Figur kyai dalam pesantren tidak terbantahkan adalah ciri khas yang tidak bisa dilepaskan dari pesantren. Di era modern ini juga figur kyai masih menjadi faktor penting untuk mengundang banyak santri masuk dalam sebuah pesantren. Figur kyai menjadi kekuatan perekat, kekuatan control bagi bukan hanya manajerial tetapi juga bagi pengawalan nilai-nilai religius pesantren.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dicanangkan sejak tahun 2015 sedikit banyak akan berpengaruh pada sistem pendidikan yang berlangsung di Indonesia termasuk pendidikan pesantren. Kemunculan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 membutuhkan pemahaman yang lebih serius bagi dunia pesantren terutama bagi para kyai yang menjadi penentu arah kebijakan pendidikan pesantren.

Konsep dasar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 dalam perspektif sektor kerjasama terdiri dari tiga (3) poin utama, yaitu: politik, ekonomi, dan sosial budaya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) pada dasarnya merupakan perpanjangan dari berbagai pertemuan rutin para pemimpin Negara ASEAN, dalam menjaga dan penguatan *ASEAN Community*. *ASEAN Community* sendiri dicetuskan oleh para Pemimpin Negara ASEAN di Cebu, Filipina (13 Jan 2007) dan *ASEAN Charter* (Desember 2008). Dengan membawa slogan “*Ten Nation, One Community*” (Indonesia,

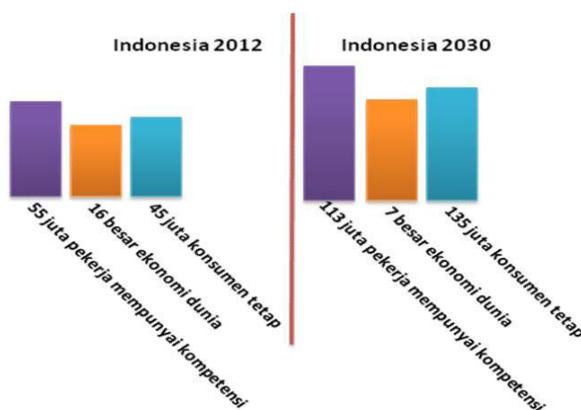
5 Moh. Ahyadi, “Pesantren, Kiai, dan Tarekat ; Studi tentang Peranan Kiai di Pesantren dan Tarekat”, dalam Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2001), p. 133

Malaysia, Singapura, Laos, Mianmar, Vietnam, Filipina, Brunai Darussalam, Kamboja dan Thailand) berkomitmen menjaga kerjasama dalam berbagai bidang.

Pendidikan secara luas bukan saja media transfer ilmu pengetahuan tetapi telah dikembangkan menjadi sektor perekonomian yang bergerak dalam bidang jasa. Dengan begitu, tidak mungkin dalam aplikasinya, peran serta Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan lepas dari kerjasama pendidikan dengan berbagai atribut di dalamnya.

Mc Kinsey Global Institute tahun 2012 pernah merilis sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa perekonomian di Indonesia tidak sepenuhnya dapat dipahami, namun sejalan dengan perkembangannya, Indonesia mencatat bahwa di tahun itu Indonesia telah menempati posisi 16 besar ekonomi dunia. Lebih lanjut dikatakan bahwa diprediksi pada tahun 2030 Indonesia akan menempati posisi tujuh besar ekonomi dunia.⁶ Berikut adalah beberapa data yang dapat dianalisis bersama:

⁶ Usman, *ibid.*, p. 302



Gambar 1 : pertumbuhan ekonomi Indonesia
Sumber : Mc Kinsey Global Institute

Selain data dan prediksi tersebut masih terdapat satu poin lagi, yaitu bahwa pada tahun 2012 Indonesia telah menghasilkan setengah milyar dollar dari berbagai aktivitas perekonomian (jasa, perkebunan, perikanan, pertambangan dan pendidikan). Sementara itu prediksi pada tahun 2030, Indonesia pada sektor yang sama akan menghasilkan 1,8 milyar dollar.

Prediksi yang sama mengherankannya dari Mc Kinsey Global Institute berkaitan dengan prediksi tingkat keterpenuhan antara permintaan dan suplai akan sumber daya manusia, dimana disebutkan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami krisis sumberdaya manusia yang berkompeten, sebagaimana tergambar sebagai berikut :



Gambar 2: Prediksi Permintaan dan Persediaan Sumberdaya Manusia
Sumber: Mc Kinsey Global Institute (2012)

Adanya kesenjangan antara permintaan dan suplai akan sumber daya manusia disebabkan dikarenakan pada tahun 2030 Indonesia akan membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi tinggi dan menengah sejumlah 113 juta pekerja, hingga pada akhirnya Indonesia akan minus 9 juta pekerja.

Analisis terkait dengan ancaman krisis sumber daya manusia dan potensi tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan menjadi salah satu bahan penting bagi pesantren untuk mengambil peran strategis mensuplay manusia-manusia *ulul albab* yang memiliki karakter kuat sekaligus keterampilan yang berdaya saing tinggi. Persoalannya, peran apa yang akan diambil pesantren untuk menjawab tantangan tersebut ?, Apakah pesantren masih akan berkuat dengan paradigma lama, yang menyebutkan bahwa pesantren adalah pendidikan agama (*tafaqquh fiddin*) dan bukan pendidikan mengembangkan sains dan teknologi ?.

Berdasarkan data dari kementerian agama bahwa Pondok Pesantren tahun 2011-2012 berjumlah 27.230 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Populasi Pondok Pesantren terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten yang berjumlah 78,60% dari jumlah seluruh Pondok Pesantren di Indonesia. Dengan rincian Jawa Barat 7.624(28,00%), Jawa Timur 6.003(22,05%), Jawa Tengah 4.276 (15,70%), dan Banten 3.500 (12,85%). Dari seluruh Pondok Pesantren yang ada, berdasarkan tipologi Pondok Pesantren, terdapat sebanyak 14.459 (53,10%) Pondok Pesantren Salafiyah, dan 7.727 (28,38%) Khalafiyah/Ashriyah, serta 5.044(18,52%) sebagai Pondok Pesantren Kombinasi.

Dalam studinya, Rahardjo (1985) menyimpulkan bahwa sejak awal pertumbuhannya, pesantren mempunyai bentuk yang beragam sehingga tidak ada suatu standarisasi yang berlaku bagi semua pesantren. Namun demikian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pesantren tampak adanya pola umum, yang diambil dari makna peristilahan pesantren itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu pola tertentu. Secara garis besar lembaga pesantren menurut Yacob (1984) dapat digolongkan menjadi dua tipologi, tipe pesantren salafi dan tipe pesantren khalafi.

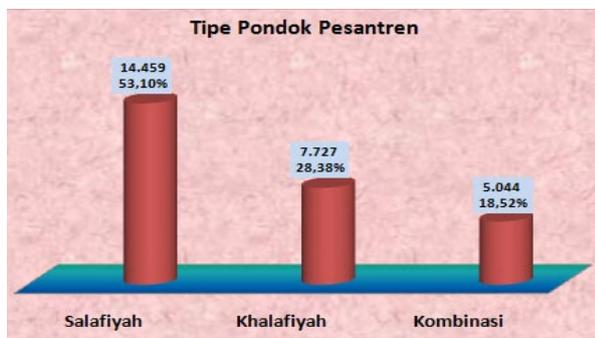
Pesantren salafi yaitu pesantren yang tetap mempertahankan sistem (materi pengajaran) yang sumbernya kitab-kitab klasik islam atau kitab dengan huruf arab “gundul”. Sistem *sorogan* (individual) menjadi sendi utama yang diterapkan. Pengetahuan non agama tidak diajarkan. Sementara pesantren khalafi yaitu sistem pesantren yang menerapkan sistem madrasah, yaitu pengajaran secara klasikal, dan memasukan pengetahuan umum dan bahasa non Arab dalam kurikulum, serta tak lupa menambahkan dengan berbagai keterampilan.⁷

Sementara itu Ziemek (1986) mengadakan klasifikasi jenis-jenis pesantren yang berdasarkan kelengkapan unsur-unsur pesantren dalam hal ini diasumsikan bahwa semakin lengkap unsur yang mendasari suatu pesantren, maka pesantren itu memiliki tingkatan yang tinggi, yaitu tipe: pesantren yang paling sederhana; pesantren yang lebih tinggi tingkatannya; pesantren yang di tambah

7 Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 2011), p. 44-45, Abuddin, *ibid.*, p. 139

dengan lembaga pendidikan; pesantren yang memiliki fasilitas lengkap; dan pesantren yang besar dan berfasilitas lengkap, biasanya memiliki induk dan cabang.

Pendataan Pondok Pesantren tahun 2011-2012 berhasil mendata 27.230 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Populasi Pondok Pesantren terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten yang berjumlah 78,60% dari jumlah seluruh Pondok Pesantren di Indonesia. Dengan rincian Jawa Barat 7.624 (28,00%), Jawa Timur 6.003 (22,05%), Jawa Tengah 4.276 (15,70%), dan Banten 3.500 (12,85%). Dari seluruh Pondok Pesantren yang ada, berdasarkan tipologi Pondok Pesantren, terdapat sebanyak 14.459 (53,10%) Pondok Pesantren Salafiyah, dan 7.727 (28,38%) Khalafiyah/Ashriyah, serta 5.044 (18,52%) sebagai Pondok Pesantren Kombinasi.⁸



Gambar 3. Pondok Pesantren Berdasarkan Tipe TP. 2011-2012

Dilihat dari jumlah santri berdasarkan kategori tinggal, terdapat 3.004.807 orang santri mukim (79,93%), dari jumlah tersebut 1.517.314 orang santri (50,50%) berjenis kelamin laki-laki, sedangkan yang berjenis

kelamin perempuan sebanyak 1.487.493 (49,50%) santri, untuk santri tidak mukim berjumlah 754.391 orang santri (20,07%), dari jumlah tersebut 369.434 orang santri (48,97%) berjenis kelamin laki-laki, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 384.957 orang santri (51,03%).



Gambar 4. Jumlah Santri Berdasarkan Kategori Tinggal

Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh santri yang mendapat pendidikan di pondok pesantren bermukim (79,93%). Hal ini dikarenakan memang dalam pembelajaran di pondok pesantren, waktu belajar adalah hampir 24 jam penuh. Mulai dari santri bangun tidur, sekolah formal, mengerjakan aktifitas lain sampai santri tidur, bangun malam dan bangun tidur kembali, terus dalam pengawasan dan pembinaan pondok pesantren sehingga umumnya santri diharuskan untuk mukim.

Umumnya untuk pondok pesantren di pulau Jawa, santrinya mukim, seperti Jawa Timur 95,45% Jawa Barat 91,52%, Banten 79,92% dan Jawa Tengah 69,12%. Sedangkan untuk diluar Jawa hanya sebagian besar saja yang mukim (40-60%), lainnya tidak mukim. Kecuali pada provinsi Jambi 86,38%, Sulawesi Utara 100%, dan Maluku 100%.

Pada perkembangan selanjutnya menurut Saridjo (1980), pondok pesantren telah

⁸ Kemenag, "Analisis dan Interpretasi Data pada Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Tahun Pelajaran 2011-2012", dalam <http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontrenanalisis.pdf>, p. 70

berkembang dan merupakan lembaga gabungan antara sistem pondok dan pesantren, yang memberikan pendidikan dan pengajaran Islam dalam sistem non klasik, sedang santrinya dapat bermukim di pondok yang disediakan atau merupakan santri *kalong* (santri yang tidak bermukim di pondok). Pondok pesantren inipun pada gilirannya menyelenggarakan sistem pendidikan klasikal baik yang bersifat pendidikan umum maupun agama yang lazim disebut madrasah. Karakteristik lain yang melekat pada pondok pesantren menurut Abdullah Syukri Zarkasyi (2010) adalah adanya sistem nilai dalam pesantren yang menjadi jiwa filsafat hidup serta orientasi pendidikan pesantren pada umumnya, seperti keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah, dan kebebasan.⁹

Permasalahan umum yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia saat ini terpusat pada empat (4) poin utama, yaitu: *pertama*, dikotomi keilmuan; *kedua*, ketidakjelasan antara jenis pendidikan-vokasi-profesi; *ketiga*, disparitas mutu lulusan pada jenjang yang sama; dan *keempat*, ketidaksetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) untuk program studi yang sama. Bila permasalahan tersebut dipandang sebagai kompleksitas problematika pendidikan secara (ilmu) umum, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pesantrenpun mempunyai permasalahan umum yang tidak kalah kompleksnya, di antaranya: *pertama*, adanya paradigma lama yang melekat (dokmatis); *kedua*, persepsi tradisional (dikotomi keilmuan); dan *ketiga*, sumber daya manusia (*input-prose-output-outcomes*), bahkan sampai sekarang masih terdapat persepsi bahwa pondok pesantren

yang ada di Indonesia sebagian besar masih pada tipologi Salafiyah, yang pembelajarannya masih murni mengaji dan membahas kitab kuning. Sebagian lain sudah modern dengan pengembangan pembelajaran ilmu *science* dan sebagian lain lagi mengkombinasikan pembelajaran kitab kuning dan ilmu *science* dan iptek. Formal (sekolah); dan *ketiga*, Nonformal (masyarakat). Pendidikan nonformal adalah salah satu bentuk pendidikan di samping pendidikan formal dan informal.

Pendidikan nasional bertujuan mempersiapkan masyarakat baru yang lebih ideal, yaitu masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban dan berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa. Esensi dari tujuan pendidikan nasional adalah proses menumbuhkan bentuk budaya keilmuan, sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik dalam perspektif tertentu harus mengacu pada masa depan yang jelas (Pembukaan UUD 1945 Alenia 4). Melalui kegiatan pendidikan, gambaran tentang masyarakat yang ideal itu dituangkan dalam alam pikiran peserta didik sehingga terjadi proses pembentukan dan perpindahan suatu materi. Pemikiran ini mengandung makna bahwa lembaga pendidikan sebagai tempat pembelajaran manusia memiliki fungsi sosial (agen perubahan di masyarakat). Pendidikan menurut Sagala (2010) merupakan karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani tertentu. Sedangkan menurut John Dewey (dalam Arif Rahman, 2011) mengartikan pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental baik secara intelektual maupun emosional ke arah alam dan sesama manusia.

⁹ Usman, *ibid.*, p. 305

C. Dinamika Perubahan Adaptatif Pesantren

Perkembangan pesantren modern menunjukkan adanya perubahan yang sangat dinamis. Model pendidikan pesantren dipercaya mampu membentuk karakter yang kuat dan efektif mentrasfer pengetahuan kepada anak didik. Oleh karena itu, model pendidikan berasrama diadopsi oleh banyak lembaga pendidikan non pesantren termasuk pendidikan kejuruan seperti kepolisian, pendidikan militer, pendidikan untuk tugas negara. Hal ini menunjukkan secara akademik model pendidikan pesantren merupakan model paling berpotensi untuk melahirkan sumber daya manusia yang bernilai saing tinggi.

Sebagai pendidikan asli Indonesia, tentu saja pesantren memiliki akar tradisi yang kuat dan oleh karena itu memiliki respon yang beraneka ragam terhadap modernitas. Ada pesantren yang menolak modernitas dan tetap konsisten dengan model pendekatan tradisional yang berbasis kitab kuning dengan metode sorogan dan berbasis pada kepemimpinan dan manajemen kyai. Pesantren ini seiring perjalanan waktu sulit beradaptasi dengan

perkembangan terbaru di dunia pendidikan modern. Ada yang tetap mempertahankan model klasik tetapi bermitra dengan sekolah-sekolah formal yang ada di sekitar pesantren dan atau pesantren itu menggunakan model pendidikan ganda; sekolah di pagi hari dan pesantren tradisional di waktu sore dan malam. Ada model pesantren yang dengan tegas menyebut dirinya sebagai pesantren modern. Pesantren modern ketiga ini mengadopsi model pembelajaran dan manajerial pendidikan yang juga diterapkan dalam pendidikan modern.¹⁰

Berdasarkan respon pesantren terhadap modernitas di atas, maka penting untuk mengidentifikasi nilai-nilai dinamis pesantren yang memungkinkan beradaptasi dengan perkembangan terkini dari pesantren, dan mengenali nilai-nilai negative yang menjadi penghambat pesantren dalam beradaptasi dengan kemoderenan. Berdasarkan Identifikasi dari sejumlah pesantren yang ada, menurut Mastuhu (1994)¹¹, pesantren memiliki nilai-nilai atau butir-butir positif, negatif, dan plus minus, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

¹⁰ Kadarusman, *ibid.*, p. 7

¹¹ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994).

POSITIF	NEGATIF	PLUS-MINUS
1. Pandangan pesantren bahwa manusia dilahirkan menurut fitrahnya masing-masing; 2. Pandangan bahwa tugas melakukan pendidikan dipandang sebagai ibadah;	1. Pandangan bahwa ilmu adalah hal yang sudah mapan dan dapat diperoleh melalui berkah kyai. 2. Pandangan tidak kritis yang menyatakan bahwa apa-apa yang diajarkan kyai, ustaz, dan kitab-kitab agama yang diterima sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi.	1. Sistem asrama; 2. Metode halaqah; 3. Jenis kepemimpinan.

POSITIF	NEGATIF	PLUS-MINUS
3. Hubungan yang baik saling menghormati antara guru dan murid;	3. Pandangan bahwa kehidupan <i>ukhrawi</i> paling penting, sedang kehidupan duniawi dipandang tidak atau kurang penting.	
4. Lembaga pendidikan pesantren dipandang sebagai tempat mencari ilmu dan mengabdikan, bukan sebagai tempat mencari kelas dan ijazah;	4. Metode belajar dengan menghafal dan pemikiran tradisional yang diterapkan untuk semua ilmu.	
5. Metode belajar <i>halaqah</i> dan <i>sorogan</i> (d disesuaikan dengan zamannya);	5. Kepatuhan mutlak pada guru dan pada kehidupan kolektif (asrama). Sehingga dapat menghambat perkembangan individualitas (jati diri) dan menghambat timbulnya berpikir kritis	
6. Nilai pendidikan dengan sistem asrama;	6. Pandangan hidup fasilitas yang menyerahkan nasib kepada keadaan, dan perilaku sakral dalam menghadapi berbagai realita kehidupan keduniawian sehari-hari	
7. Pandangan hidup jangka panjang dan menyeluruh.		

Matrik 1. Nilai-Nilai Positif, Negatif, Dan Plus Minus Pesantren

Pesantren sebagai salah satu model pendidikan Islam berdasar tabel di atas mempunyai permasalahan umum yang tidak kalah kompleks, di antaranya: *pertama*, Relevansi, yaitu: adanya paradigma lama yang melekat (dokmatis); *kedua*, Manajemen, yaitu: persepsi tradisional (dikotomi keilmuan); dan *ketiga*, Kualitas, yaitu: sumber daya manusia (*input-prose-output-outcomes*). *Keempat*, lemahnya produktifitas ekonomi sebagai modal gerak pesantren.

Beberapa dasawarsa terakhir ini Mastuhu (1994) terjadi pergeseran yang dialami oleh pesantren. Beberapa indikator pergeseran yang dialami oleh pesantren antara lain: *pertama*, Kyai bukan lagi satu-satunya sumber belajar;

kedua, dewasa ini hampir seluruh pesantren yang menyelenggarakan jenis-jenis pendidikan formal yaitu, madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi; *ketiga*, seiring dengan pergeseran pola tersebut, santri memerlukan atau keahlian yang jelas; *keempat*, santri cenderung semakin kuat untuk mempelajari sains dan teknologi; *kelima*, belajar dengan biaya sudah memasuki dunia pendidikan; *keenam*, dikenalnya model pesantren yang berkelas; dan *ketujuh*, karakteristik pengelolaan pendidikan pesantren.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa di samping telah terjadi pergeseran pada pesantren seperti yang disebutkan di atas, karakteristik pesantren yang mengarah pada *fiqh-sufistik*

dalam maknanya yang sempit, dewasa ini juga relatif banyak. Pandangan sufistik yang bersifat teosentris ini sangat menekankan dan lebih memilih “budaya hidup asketis” yang disimbolkan oleh pola hidup kesederhanaan baik secara sosial maupun ekonomi. Komunitas pesantren terutama disimbolkan para santri, sangat menekankan kehidupan model sufistik ini, mulai dari soal pakaian, tempat tidur, ruang belajar, tempat memasak, kamar mandi, selain bersifat sangat sederhana juga tampak “kotor”. Jadi ketika mereka memahami bagaimana cara-cara hidup sehat maka cenderung berkonotasi “spiritual”.¹²

D. Nilai-Nilai Moderat Pesantren sebagai Modal Menuju MEA

Moderatisme Pesantren berarti sikap adaptatif dan terbuka yang diambil pesantren terhadap perkembangan terbaru dari dunia yang ada sekelilingnya yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh kepada dunia pesantren. Moderatisme pesantren melekat dalam filosofi kaedah *al-muhafadatu ala al-qadim as-saleh wa al-akhdu bi al-jadid al-aslah* (menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik). Bahkan di beberapa pesantren kemoderatan ini dilekatkan kata “modern” dalam nama pesantren pesantren yang berarti kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.¹³ Karena, alasan ini pula modernitas pesantren dapat dipandang sebagai modal utama pesantren menuju MEA.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dicanangkan sejak tahun 2015 secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh

¹² Lihat Usman.....*ibid.*

¹³ Lihat makna modern pada “Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam”, Kadarusman, *Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Keassalaaman*, (Solo : Assalaam Press, 2006), p. 47

kepada system pendidikan di Indonesia termasuk pesantren. Konsep dasar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 dalam perspektif sektor kerjasama terdiri dari tiga (3) poin utama, yaitu: politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Dalam konteks pendidikan pesantren, MEA menuntut pesantren memiliki Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) yang relevan dengan kebutuhan SDM yang berstandar ASEAN dan bahkan Internasional. Suatu standar kompetensi tertentu sebagai pencapaian hasil yang diukur melalui berbagai indikator baik *input-proses* maupun *out put-out come*.

Memotret nilai-nilai dasar pesantren yang moderat sebagai basis pendidikan Islam di Indonesia dapat dilihat beberapa modalitas yang dapat meningkatkan daya saing pesantren dalam pendidikan modern termasuk untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Beberapa sistem nilai ini secara *das sollen* seyogyanya dikembangkan dalam dunia pesantren jika ingin mengadaptasikan diri dengan perkembangan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

1. Multikulturalisme Pesantren.

Secara etimologis kata “multikultural” merupakan kata benda yang dalam bahasa Inggris berasal dari dua kata, yaitu “multi” dan “culture.” Secara umum, kata “multi” berarti banyak, ragam, dan atau aneka.¹⁴ Sedangkan kata “culture” dalam bahasa Inggris memiliki beberapa makna, yaitu kebudayaan, kesopanan, dan atau pemeliharaan. Atas dasar ini, kata multikultural berarti keragaman kebudayaan, aneka kesopanan, dan atau banyak pemeliharaan.

¹⁴ Kajian lebih lanjut tentang multikulturalisme di Indonesia, lihat Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2003), p. 301

Selanjutnya untuk menemukan karakteristik pendidikan multikultural terlebih dahulu perlu dibahas pengertiannya. Menurut Fredrick J. Baker (2004: 1) pendidikan multikultural adalah “gerakan reformasi yang didesain untuk mengubah lingkungan pendidikan secara menyeluruh sehingga peserta didik yang berasal dari kelompok ras dan etnik yang beragam memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan di sekolah, pendidikan tinggi, dan universitas.” Senada dengan pengertian di atas, Francisco Hidalgo, at.all (2001: 1) menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah “pembelajaran yang bebas dari rasisme, seksisme, serta

bentuk-bentuk dominasi sosial dan intoleran lainnya.” Sementara itu, menurut Okado (2005: 1) pendidikan multikultural merupakan “pendidikan yang membantu para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mengenal, menerima, menghargai, dan merayakan keragaman kultural.” Pengertian senada dikemukakan oleh Keith Wilson (2005: 1) bahwa pendidikan multikultural adalah “pendidikan yang didesain berdasarkan pembangunan konsensus, penghargaan, dan penguatan pluralisme kultural ke dalam masyarakat yang rasial.”¹⁵

¹⁵ Abdullah Aly, “Studi Deskriptif tentang Nilai-Nilai Multikultural dalam Pendidikan di PPMI Assalaam-Sukoharjo”, *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Vo. 1, No. 1 Januari 2015, p. 11

NO	NILAI INTI MULTIKULTURAL	DESKRIPSI
1	Demokrasi, Kesetaraan dan Keadilan	Nilai ini ada dalam al-Qur’an surat al-Baqarah [2]: 256 dan al-Kafirun [109]: 1-6. Telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW untuk mengelola keragaman kelompok dalam masyarakat di Makkah dan Madinah.
2	Kemanusiaan, Kebersamaan, dan Kedamaian	Ditemukan keberadaannya dalam al-Qur’an Surat al-Hujurat: 13 dengan doktrin saling mengenal (<i>ta’aruf</i>) dan saling menolong (<i>ta’awun</i>) untuk membangun hubungan sosial yang baik.
3	Sikap Mengakui, Menerima, dan Menghargai Keragaman	Al-Qur’an surat al-Nahl: 125 dan Fushshilat: 34 memperkenalkan sikap ini dan menolak adanya sikap hidup yang diskriminatif.

Matrik 2. Nilai Inti dalam Pendidikan Multikultural¹⁶

¹⁶ *Ibid.*

Memperhatikan rumusan pengertian para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai inti dan sikap sosial tertentu. Matrik 1 menyebut ada 3 nilai inti yang terdapat dalam pendidikan yang multikultural, yaitu: (1) nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan; (2) nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian; serta (3) sikap sosial, yaitu: pengakuan, penerimaan, dan penghargaan kepada orang lain.

Berdasarkan pengalaman pesantren terkait dengan sistem nilai dan budaya yang berkembang di pesantren maka dapat dilihat beberapa nilai-nilai multikultural yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam pendidikan pesantren ke depan. Moderatisme pesantren tercermin dalam nilai-nilai multicultural di pesantren sebagaimana dijelaskan dalam matrik di bawah ini.

NO	NILAI MULTIKULTURAL	DESKRIPSI
1	Nilai keanekaragaman (<i>al-tanawwu'iyah</i>)	Keanekaragaman merupakan <i>sunnatullah</i> di pesantren dan diekspresikan dalam kurikulum, materi ajar, kitab kuning yang dijadikan referensi, dan bahasa pengantar sehari-hari.
2	Nilai persamaan dan keadilan (<i>al-musawah wa al-'adl</i>)	Kyai mentradisikan nilai persamaan dan keadilan di lingkungan pesantren berdasarkan al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 8. Semua santri berhak memperoleh pendidikan dan pelayanan yang sama dari pesantren serta untuk berinteraksi dengan sesama santri di lingkungan pesantren. Semua santri memiliki kewajiban yang sama, tanpa memandang asal usul daerah santri dan status sosial ekonominya.
3	Toleransi (<i>al-tasamuh</i>) dan saling menghargai di antara para santri	Para santri belajar memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di pesantren seperti: minat, kepribadian, asal usul daerah, kecerdasan, dan status sosial ekonomi para santri.
4	Musyawarah (<i>al-musyawaharah</i>)	Dijadikan metode untuk mengkaji kitab-kitab Islam klasik bagi para santri senior untuk membahas persoalan-persoalan keagamaan.
5	Persaudaraan dan kebersamaan (<i>al-ukhuwah</i>)	Nilai persaudaraan dan kebersamaan hidup di lingkungan pesantren karena 3 (tiga) alasan: (a) para santri merasa sama-sama jauh dari keluarga, (b) para santri meyakini sama-sama orang Islam, dan (c) mereka memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu belajar tentang Islam.
6	Perdamaian (<i>al-salam</i>)	Disosialisasikan melalui kegiatan ritual sehari-hari, terutama dalam shalat jamaah dan wirid. sesudahnya.

Matrik 3. Nilai-Nilai Multikultural di Pesantren

Nilai-nilai multikultural ini merupakan pandangan yang moderat bagi pesantren untuk membuka diri beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tentu saja sikap multikultural tetap dipadukan dengan nilai-nilai utama di pesantren. Sebab, hilangnya nilai utama akan menyebabkan menurunnya paradigman pendidikan pesantren yang asli. Disinilah dibutuhkan ijtihad baru terkait redesain pendidikan pesantren dari persoalan manajerial, kurikulum sampai sarana prasarana pesantren.

2. Tradisi Akademik Pesantren.

Budaya adaptatif sistem pengelolaan pesantren juga merambah di bidang keilmuan.

Tradisi pendidikan pesantren awal menunjukkan bahwa keilmuan pesantren hanya terbatas kepada bidang fikih, akhlak, akidah, al-Qur'an, dan hadis. Perkembangan mutakhir pesantren, ada gerakan keilmuan yang sangat dinamis. Pesantren memasukkan ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu sosial, Bimbingan Konseling dan bahkan program Cambridge dalam kurikulum pesantren. Perkembangan ini menjadi sangat menarik karena pesantren tetap berpegang kepada induk keilmuan yang bersumber dari Al-Qur'an As-Sunnah.

Pemikiran dikotomik pesantren sudah tidak bisa dikembangkan dalam perkembangan masyarakat yang cepat dan modern. Artinya, pesantren perlu membuka diri untuk melayani

keinginan para santri belajar dan masyarakat dalam bidang *social sciences* maupun *natural sciences*. Dalam prakteknya, menjamurnya pesantren modern di pedesaan lebih-lebih di perkotaan justru menjadikan sains modern sebagai basis dari pembelajaran pesantren. Pesantren seperti Assalaam di Solo, Insan Cendekia di Serpong, Al-‘Izzah di Malang dan yang sejenis justru menjadikan pelajaran sains modern di samping *religion sciences* sebagai basis pendidikan pesantren.¹⁷

Pilihan jurusan di perguruan tinggi bagi lulusan pesantren lebih banyak mengambil jurusan-jurusan non keagamaan seperti kedokteran, ekonomi, psikologi dan hubungan Internasional bahkan sebagai dari mereka masuk ke pendidikan akademi seperti kepolisian, akademi militer dan angkatan laut di Surabaya.¹⁸

3. Manajerial dan Kepemimpinan Pesantren.

Manajerial dan kepemimpinan pesantren berbasis kyai sudah dibuktikan sejarah tidak mampu mengawal estafeta perjalanan pesantren. Menyadari hal tersebut di atas, kyai semakin dapat menerima penyelenggaraan modernisasi pesantren di tengah-tengah perubahan masyarakat Indonesia yang cepat.¹⁹ Kepemimpinan pesantren dipilih berdasarkan kemampuan manajerial dengan masa kerja dalam beberapa tahun jabatan.

Pesantren-pesantren yang eksis adalah pesantren yang merumuskan konsep manajerialnya kepada konsep manajerial modern yang akuntabel, transparan dan

kredibel. Pesantren sudah mulai membudayakan sistem rapat tahunan sebagai forum evaluasi, penyusunan program kerja dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tahunan. Istilah-istilah penjaminan mutu dan *key performance indicators* bukan lagi menjadi istilah asing dari dunia pesantren. Keputusan pesantren didasarkan kepada distribusi kewenangan di antara para pemimpin pesantren.

Sistem kepemimpinan yang di masa lalu berbasis kepada kyai kharismatik berubah menjadi kepemimpinan kolektif kolegial. Kepemimpinan kolektif kolegial meletakkan kekuasaan tertinggi pesantren terdistribusi kepada beberapa level kepemimpinan pesantren. Dalam hal ini, musyawarah menjadi penting dalam pengambilan keputusan. Model seperti ini –mau tidak mau- mendorong para kyai yang bergelut dengan kitab kuning dalam kehidupan sehari-hari juga harus belajar konsep rapat kerja, penyusunan program kerja, *key performance indicators*, sistem penganggaran dan bahkan audit anggaran.

Tentu saja perkembangan ini menjadi penting bagi pesantren. Di samping membangun konsep manajerial yang jujur atas dasar keyakinan agama tetapi mencoba memformat kejujuran atas dasar agama tersebut dalam sebuah sistem manajerial yang transparan dan akuntabel.

4. Poros Ekonomi Pesantren.

Perkembangan baru dari dunia pesantren adalah menjadikan pesantren sebagai poros ekonomi umat.²⁰ Gerakan ekonomi pesantren belum menjadi *trend* dalam pengelolaan

¹⁷ Lihat kurikulum dan program pendidikan PPMI Assalaam sebagai contoh model pendidikan modern, Kadarusman, *ibid.*, p. 71

¹⁸ Lebih lanjut lihat, Drs. Tarmi, “Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia”, dalam Abuddin, *ibid.*, P. 187

¹⁹ Dhofier, *ibid.*, p. 277

²⁰ Nilai penting pengembangan ekonomi pesantren menjadikan MUI berinisiatif untuk mengadakan kongres ekonomi umat tahun 2017. Kongres di diantara yang menjadi focus diskusi adalah ekonomi pesantren. Lihat, MUI, *Kongres Ekonomi Ummat Islam*, (Jakarta : MUI, 2017), 9-26

pesantren. Gerakan ekonomi pesantren identik dengan gerakan ekonomi yang dimiliki oleh kyai pesantren. Namun, dengan munculnya perbankan syariah pada tahun 1990-an dan diikuti dengan munculnya BMT membuka cakrawala berfikir pesantren bahwa kekuatan ekonomi menjadi salah satu kekuatan yang sangat penting dalam pendidikan pesantren. Gerakan ekonomi menjadi bagian dari induk pengembangan pesantren.²¹

Model gerakan infak dan shadaqah tidak bisa menjadi tumpuan pesantren dalam menghidupi dirinya sendiri. Pendekatan modern dalam pengelolaan pesantren ternyata membutuhkan sumber pendanaan yang tidak sedikit dari segi pengadaan sarana prasarana sampai pemberian gaji para guru dan karyawannya. Kalau biaya operasional pesantren dibebankan kepada para santri maka bisa dipastikan biaya pendidikan pesantren akan tinggi dan tidak mungkin dibebankan kepada santri yang berada pada ekonomi menengah ke bawah.

Kesadaran ekonomis ini menjadi modal utama pesantren menatap MEA. Usaha-usaha Majelis Ulama Indonesia dan BI untuk memetakan ekonomi pesantren merupakan indikasi bahwa ekonomi pesantren pelan tapi pasti akan menentukan dan menjadi penopang utama perekonomian nasional.²² Beberapa pesantren sudah melakukan eksperimentasi pengembangan ekonomi pesantren tanpa harus mengganggu pesantren sebagai pusat *tafaqquh fiddin*.

Secara manajerial bisnis dan pendidikan memiliki basis budaya yang berbeda. Logika

bisnis yang berorientasi kepada keuntungan dengan logika pendidikan pesantren yang berorientasi pada *tafaqquh fiddin* kadangkala tidak dapat bertemu dalam satu dinamika. Oleh karena itu sikap moderat dibutuhkan agar manajemen pengelolaan dilakukan secara professional sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Pendidikan bertugas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang religious, berakhlak dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai.

Di era MEA, poros ekonomi pesantren yang bersinergi dengan kekuatan pendidikan pesantren akan sangat strategis untuk menjadi kekuatan pesantren bersaing melahirkan di samping untuk melahirkan para santri yang memiliki keseimbangan spiritual, intelektual dan moral maupun keterampilan mengelola ekonomi umat.

E. Kesimpulan

Kesimpulan akhir pada tulisan ini menegaskan bahwa pesantren berdasarkan beberapa nilai-nilai moderat yang ada di dalam dunia pesantren telah memiliki kesiapan untuk memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN. Beberapa nilai-nilai moderat untuk menghadapi MEA adalah nilai-nilai multikultural sebagai konsep adaptatif terhadap perkembangan zaman, tradisi akademik yang non dikotomik, manajerial modern yang berbasis mutu dan kepemimpinan kolektif kolegial serta pesantren sebagai poros ekonomi umat.

Beberapa keyakinan di atas tentu membutuhkan konseptualisasi lebih lanjut agar pesantren tidak kehilangan ruh kepesantrenannya. Oleh karena itulah eksperimentasi dan budaya *trial and error*

²¹ Gerakan ekonomi pesantren bersimbiosis dengan program koperasi terutama dalam bentuk KSPPS. Lihat, Azrul Tanjung (ed.), *Reinventing Budaya Bisnis Untuk Kesejahteraan dan Kejayaan Peradaban Islam*, (Jakarta : Grafindo, 2014), p. 155

²² *Ibid.*, p. 218

penting untuk dilakukan pesantren. Tanpa ada keberanian untuk melakukan eksperimentasi maka tidak akan pernah menemukan kerangka konseptual pesantren yang berdaya saing tinggi di era MEA.

Wallahu A'lam Bish-Showab,

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyadi, Moh., "Pesantren, Kiai, dan Tarekat ; Studi tentang Peranan Kiai di Pesantren dan Tarekat", dalam Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Grasindo, 2001.
- Aly, Abdullah, "Studi Deskriptif tentang Nilai-Nilai Multikultural dalam Pendidikan di PPMI Assalaam-Sukoharjo", *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Vo. 1, No. 1 Januari 2015.
- Arifin, Syamsul, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Milenium Baru*. Jakarta: Logos, 1999.
- Bakar, Usman Abu, "Pesantren (Dari Dulu) Siap Untuk ASEAN Economic Community (Acc) 2016 (Studi Adaptasi Nilai Pesantren Menjadi Asrama Mahasiswa)", *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Vol. 3 No 1 Januari 2017
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Burnett, Gary, *Varieties of Multicultural Education: An Introduction*. New York: ERIC Publication, 2003.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 2011.
- E.B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Isti Widiyati Jakarta: Erlangga, 1996.
- Kadarusman, *Moderasi Turats Pesantren Menapaki Jejak-Jejak Kehidupan 24 Jam*, Solo : Assalaam Press, 2005
- _____, *Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Keassalaaman*, Solo : Assalaam Press, 2006
- Kemendikbud, *Kumpulan Permen dan Permendikbud tentang Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas*, Jakarta : Kemendikbud, 2014.

- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.
- Mc Kinsey Global Institute, *Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*. Mc Kinsey: Global Institute, 2012.
- Mochtar, Affandi. "Tradisi Kitab Kuning: Sebuah Observasi Umum," dalam Said Aqiel Siradj (ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- MUI, *Kongres Ekonomi Ummat Islam*, Jakarta : MUI, 2017.
- Nakosteen, Mehdi, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat*, terj. Joko S. Kahar. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Purwasito, Andrik, *Komunikasi Multikultural*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2003.
- Rahardjo, Dawam, *Pergumulan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, Jakarta: P3M, 1985.
- Rahardjo, M. Dawam, "Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren", dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Jakarta: P3M, 1985.
- Sachedina, Abdulaziz. 2001. *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. New York: Oxford University Press.
- Saridjo, Marwan, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Dharma Bakti, 1980.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Suryadinata, Leo, dkk., *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Tanjung (ed.), Azrul, *Reinventing Budaya Bisnis Untuk Kesejahteraan dan Kejayaan Peradaban Islam*, Jakarta : Grafindo, 2014.
- Zuhri, Saefuddin. "Pendidikan Pesantren di Persimpangan Jalan", dalam Said Aqiel Siraj et.al., *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.